



**Kementerian Koordinator
Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia**

Siaran Pers Nomor: 239/HUMAS PMK/X/2022

Pemerintah Sediakan Data Terfokus Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

*Rakor dengan Pemda, Menko PMK Minta Intervensi Segala Penjuru

KEMENKO PMK -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, butuh komitmen pemerintah daerah untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Menurut dia, pemerintah daerah sangat berperan penting dalam melaksanakan program intervensi, menetapkan target sasaran, dan kebijakan penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat.

Hal itu disampaikannya saat memberikan arahan secara daring dalam Rapat Koordinasi Teknis Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Riau, yang dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Riau, Bupati dan Wali Kota di Provinsi Riau, dan seluruh OPD Provinsi Riau, pada Senin (3/10/2022).

"Tentu saja ini bukan pekerjaan mudah. Maka kita harus percepat dan rumuskan dengan secermat mungkin, mengenai target sasaran serta berbagai macam jenis intervensi kepada mereka, saudara kita yang masih di dalam posisi miskin ekstrem," ujar Menko PMK.

Lebih lanjut, Muhadjir menerangkan, supaya menjangkau masyarakat miskin ekstrem dengan tepat sasaran, maka pemerintah telah menyediakan data Penyesaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Data P3KE tersebut, terang Muhadjir, berbentuk data by name by address yang sudah diverifikasi dan di- crosscheck dengan sumber berbagai data yang sudah ada, seperti dari data BKKBN, DTKS, data kependudukan Kemendagri, dan data lainnya dari BPS.

Muhadjir berharap, dengan adanya data P3KE, berbagai program dan kebijakan intervensi kemiskinan ekstrem di daerah bisa akurat dan tepat sasaran menjangkau masyarakat miskin ekstrem yang membutuhkan bantuan.

"Dengan data by name by address, dan data per desa, maka diharapkan tidak ada lagi salah sasaran. Tidak ada lagi intervensi yang dilakukan khususnya oleh pemerintah pusat dan pemda maupun dari anggaran dana desa yang meleset dan di luar sasaran," sebutnya.

Lebih lanjut, Menko PMK juga meminta pemerintah daerah untuk terus mengawal dan mengecek langsung data kemiskinan di lapangan, supaya mereka yang terjebak kemiskinan bisa mendapatkan intervensi terbaik dari pemerintah.

"Kita harapkan Bapak Gubernur, Bapak Ibu Bupati Wali Kota, masing-masing pemerintah daerah untuk betul-betul mengawal 'day to day', dari hari ke hari. Untuk memastikan bahwa mereka yang sudah terdaftar, tercatat sebagai keluarga miskin ini betul-betul diintervensi dari berbagai penjuru, dengan semua sumber daya yang ada," ungkapnya.

Menko PMK juga meminta kepada pemda untuk terus melakukan pemantauan dan penyesuaian apabila ada tambahan penduduk miskin ekstrem baru. Dengan berbagai upaya tersebut, diharapkan pemenuhan target Presiden yakni 0 persen kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 bisa terealisasi.

"Sehingga target supaya arahan Bapak Presiden pada tahun 2024 kemiskinan ekstrem di Indonesia bisa selesai," ucapnya.

Jalankan Berbagai Strategi

Dalam kesempatan itu, Gubernur Riau Syamsuar menjelaskan, angka kemiskinan ekstrem di Prov Riau berdasarkan data BPS Maret 2022 sebesar 1,40 persen, atau sebesar 100.330 jiwa. Sementara, jumlah persentase penduduk miskin di Provinsi Riau sebesar 6,78 persen atau sebesar 485.030 jiwa.

Gubernur Riau menyatakan, Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau telah berkomitmen untuk bersama-sama menurunkan angka kemiskinan ekstrem di daerahnya.

Dia menerangkan, pemerintah Provinsi Riau telah menjalankan berbagai strategi untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, mulai dari strategi pengurangan beban sosial melalui bantuan sosial, strategi peningkatan pendapatan dengan pemberdayaan sosial, dan juga strategi pengurangan kantong kemiskinan dengan perbaikan lingkungan kumuh.

Gubernur Syamsuar menyatakan bahwa seluruh unsur pemerintah daerah di tingkat Kabupaten/Kota dan hingga lingkup terkecil di Provinsi Riau siap berkolaborasi untuk menghapus kemiskinan ekstrem.

"Harapan Pak Presiden kita bisa melakukan tugas bersama Pemerintah, TNI-Polri kejaksaan, swasta dalam rangka bersama-sama menurunkan stunting di Indonesia termasuk pengendalian inflasi," ucap Gubernur Riau.

Dalam kesempatan Rapat Koordinasi dilakukan penandatanganan komitmen bersama antar Pemda Se-Provinsi Riau. Kemudian, juga dilakukan penyerahan secara simbolis data P3KE kepada Gubernur Riau oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PMK Andie Megantara. (*)

**Bagian Humas dan Perpustakaan,
Biro Hukum, Informasi dan Persidangan,
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
roinfohumas@kemenkopmk.go.id
www.kemenkopmk.go.id
Twitter@kemenkopmk
IG: kemenko_pmk**